HALAMAN PENGESAHAN

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji

Sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa "APMD" Yogyakarta, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 April 2016

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

	Tanda Tangan
1. Ketua / Pembimbing Dra. Herawati, MPA	
2. Penguji Samping I Drs. Supardal M.Si.	
3. Punguji Samping II Dra. Sri Utami M.Si	

Mengetaui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA " APMD"

YOGYAKARTA

2016

PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

HANY ERICK TEHUAYO

N.I.M : 08521925

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

"APMD"

YOGYAKARTA

2016

APMD SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (I)

Program studi ilmu pemerintahan

Disusun Oleh

HANY ERICK TEHUAYO

N.I.M : 08521925

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

''APMD''

YOGYAKARTA

2016

PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

HANY ERICK TEHUAYO

N.I.M : 08521925

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

''APMD''

YOGYAKARTA

2016

PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (I)

Program studi ilmu pemerintahan

Disusun Oleh

HANY ERICK TEHUAYO

N.I.M : 08521925

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

''APMD''

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji

Sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa "APMD" Yogyakarta, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 April 2016

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

	Tanda Tangan
1. Ketua / Pembimbing Dra. Herawati, MPA	_____
2. Penguji Samping I Drs. Supardal M.Si.	_____
3. Punguji Samping II Dra. Sri Utami M.Si	_____

Mengetaui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA " APMD"

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dimana telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, adapun skripsi ini di persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku Bapa dan alm. Mama tercinta yang dengan sepenuh hati membesarkan dan mendidikku hingga tak mungkin aku membalasnya.
- Buat keluarga besar Atambua dan Kaputu yang sudah membantuku dalam perkuliahan ini hingga selesai.
- Buat keluarga besar Tehuayo dan Ilela yang sudah membantuku dan memberikan motivasi.
- Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD"APMD" Yogyakarta.
- Organisasi kedaerahan IPMAMI (Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika).
- Terimakasih buat kedua saudaraku tersayang, kaka Henri Falate dan adik Bily Tehuayo.
- Terimakasih buat teman-teman Kontrakan Doreri yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
- Terimakasih buat teman-teman seangkatan yang telah membantuku dalam perkuliahan ini hingga selesai.
- Terimakasih buat teman-teman kost yang telah membantuku
- Terimakasih buat Adri Kusuma, Aswad dan Molsa Dwi yang telah membantuku selama proses penyusunan skripsi ini.
- Buat kekasihku tercinta"Yasintha Niis" dan "Gian Tehuayo" yang telah setia menemani dan menungguku serta memberikan kasih sayang, perhatian dan semoga Tuhan melindungi dan menyertai hubungan kita " I Love You".
- Terimakasih juga buat kota jogja dan masyarakat jogja yang mana telah menerimaku untuk menempuh studiku di sini dan telah mengajariku tentang tata krama, kesopanan dan kesabaran " Jogja Istimewa".

MOTTO

Kesalahan adalah suatu alamia yang tak dapat dihindari oleh siapapun, kamu harus mampu menghadapinya hingga akhir perjuanganmu

Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita mengambil pelajaran

Siapa yang bersungguh-sungguh, ia lah yang akan menang

Formula dari sebuah kesuksesan adalah 3 : kerja keras, pantang menyerah, dan berdoa

ketahuilah bahwa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah atau tidak berani untuk mencoba

Kesalahan akan membuat seseorang belajar untuk menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang

Jangan menyerah dan teruslah mencoba! Tuhan akan melihat usaha dan kerja kerasmu

Jujur adalah sesuatu yang pahit namun mendamaikan, sedangkan kebohongan adalah sebuah keindahan dalam kepalsuan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala kesempatan hidup yang telah Dia berikan, sehingga dengan restunya pula skripsi dengan judul : **“ Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul, (Studi Kasus Di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)**sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Mayarakat Desa STPMD “APMD”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Mushin S.Sos M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD”APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Herawati, MPA sebagai pembimbing skripsi.
4. Seluruh Dosen Program Studi S-1 Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, saudara serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta semangat yang tiada henti dalam setiap usahaku.

6. Teman-teman angkatan 2008, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pihak-pihak yang membantu menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga dapat memperlancar dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna maka segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

HANY ERICK TEHUAYO

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Pengesahan ..... **iii**

Halaman Persembahan ..... **iv**

Motto ..... **v**

Kata Pengantar ..... **vii**

Daftar Isi ..... **viii**

Sinopsis ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 13

C. Tujuan 13

D. Manfaat 13

E. Kerangka Teori 14

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 14

2. Kemiskinan 22

F. Ruang Lingkup 32

G. Metode Penelitian 33

1. Jenis Penelitian 33

2. Teknik Pengumpulan Data.....33

3. Unit Analisis 35

4. Teknik Analisis Data.....36

BAB II PROFIL KELURAHAN BANGUNTAPAN

A. Keadaan Geografis.....38

1. Letak Dan Luas Wilayah 38

2. Batas Wilayah 39

3. Wilayah Kelurahan 39

B. Keadaan Demografi 40

1. Jumlah Penduduk.....40

2. Komposisi Penduduk Menurut Umur 42

3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....43

4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 44

C. Keadaan Ekonomi Dan Sosial Budaya 45

1. Sarana Dan Prasarana 45

2. Deskripsi Potensi 48

D. Keadaan Pemerintahan 49

1. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kelurahan 49

2. Struktur Organisasi 50

3. Tugas Dan Fungsi Kelurahan.....52

4. Visi Dan Misi Pemerintahan Kelurahan Banguntapan 59

BAB III ANALISIS

A. Deskripsi Informan 61

1. Identitas Informan Menurut Umur.....61
2. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin 62
3. Identitas Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....63
4. Identitas Informan Menurut Pekerjaan/Jabatan 63

B. Analisis Pelaksanaan PNPM Mandiri 64

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Program PNPM Mandiri.....65
2. Ketepatan Sasaran Program PNPM Mandiri 66
3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri 68
4. Tercapainya Tujuan Program PNPM Mandiri.....69
5. Perubahan Nyata Masyarakat Setelah Program PNPM Mandiri 70
6. Peran Lembaga Atau Aparat Kelurahan Dalam Mengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.....71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 73

B. Saran 75

Daftar Pustaka

Lampiran

SINOPSIS

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas di perkotaan, memiliki wadah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik dalam bidang perumahan dan permukiman. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Untuk itu rumusan masalah yang diajukan adalah : Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Banguntapan?.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan deskriptif dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan obyek penelitian adalah Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Adapun jumlah informan yang di ambil adalah 14 orang, yakni : Kepala lurah dan pamong 2 orang, kepala dukuh 1 orang, ketua RT 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, koordinator pelaksana PNPM Mandiri 2 orang, dan masyarakat 5 orang. Dalam menganalisa dengan kualitatif penyusun mengelompokkan sumber data berdasarkan jenisnya, menyusun secara sistematis, kemudian menginterpretasikan atau menganalisa data tersebut dengan konsep yang relevan.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan dalam menanggulangi kemiskinan sudah efektif, karena sebagian besar masyarakat paham akan program tersebut, sasaran yang diutamakan adalah benar-benar masyarakat miskin, peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Dalam PNPM Mandiri perkotaan ada tiga kelompok program yang dikembangkan yaitu meliputi : kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan lingkungan. Kegiatan sosial ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan daripada masyarakat. Kegiatan ekonomi diarahkan pada kegiatan simpan pinjam bagi warga masyarakat miskin. Kegiatan lingkungan mencakup pembangunan fisik. Dalam pembuatan laporan atau data harus lebih akurat dan lengkap sehingga memudahkan masyarakat untuk memahaminya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan sudah efektif, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dibenahi supaya dapat menjadi lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian Negara Indonesia.Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir disemua negara-negara berkembang, terutama Negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia (Gustina, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah utama di negara kita dimana kondisi miskin tersebut terjadi dalam berbagai bidang yang ditandai dengan kerentaan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Selain itu kondisi miskin dapat berakibat antara lain:

a. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
b. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.
c. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

d. Menurunnya ketertiban umum masyarakat dan ketentraman masyarakat.
e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
f. Kemungkinan pada merosotnya mutu generasi (*lost generations*).

Dampak krisis ekonomi yang terjadi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.Untuk perkotaan lebih banyak dirasakan didaerah urbannya.Banyaknya masyarakat perkotaan yang kehilangan lapangan kerja, merupakan salah satu dampak nyata dari keberadaan krisis ekonomi tersebut.

Menyadari akan terjadinya gejala tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah operasional dalam bentuk revitalisasi dan restrukturisasi proyek-proyek pembangunan yang diarahkan untuk mengatasi jumlah pengangguran dan masyarakatmiskin, mengatasi ketidakberdayaan masyarakat yang telah jatuh miskin, termasuk didalamnya adalah apa yang terjadi di perkotaan (Tontowi, 2010).

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai Negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll).Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian,

kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.Dalam perkembangan pelaksanaan RPJMN 2004-2009, pada tahun 2008 banyak diperdebatkan jumlah dan jenis program yang termasuk di dalam program penanggulangan kemiskinan, mengingat kemiskinan memiliki dimensi pendapatan dan dimensi non-pendapatan yang lebih luas. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: (1) Program bantuan dan jaminan sosial, yaitu program yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menjangkau akses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban hidup keluarga miskin; (2) Program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan PNPM Mandiri, yaitu program yangmemberi pendampingan dan pembekalan untuk memampukan masyarakat miskin menentukan arah, langkah, dan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (3) Program yang membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan dan memperluas usahanya agar masyarakat miskin semakin stabil dan meningkat pendapatannya. Ketiga kelompok program ini atau ketiga kluster inilah yang diarahkan sebagai program penanggulangan kemiskinan. Rincian dari program-program yang termasuk di dalam 3 (tiga) kluster ini selanjutnya dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.Kelompok program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang

diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi: (1) Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya; (2) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini; (3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; dan (4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. Pada saat diluncurkan (30 April 2007) PNPM Mandiri terdiri dari: (1) PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan pernyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan (2) PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pada Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga PNPM Mandiri selain PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan ditambah dengan beberapa program lainnya: (1) PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal; (2) PNPM-PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (*Rural Infrastructure Services*; dan (3) PNPM-PISEW/RISE (Program Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah/*Rural Infrastructure for Social and Economic Activities*).

Tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia melalui presiden mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai salah satu kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, selain itu

PNPM Mandiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki lokal governance dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Kelompok masyarakat yang terbentuk dimaksudkan untuk menghilangkan marginalisasi penduduk miskin dan menjadi model jaringan pengaman sosial.

Melalui PNPM Mandiri masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi maupun pemeliharaan, untuk mencapai harapan dimaksud tentu membutuhkan kerja keras dari semua pihak baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.Pendekatan *top-down* yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan banyak mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai pengaturan dalam pelaksanaan program semuanya dikendalikan oleh pemerintah lewat organisasi-organisasi sebagai pelaksana dan pengawas. Kondisi seperti ini dapat membuat masyarakat menjadi tidak berdaya dan tidak dilibatkan secara aktif.Kondisi masyarakat yang umumnya miskin dan tak berdaya membuat masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri (Takumansang, 2013).

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu programbertujuan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan permukiman yang berkualitas di perkotaan memiliki

wadah dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik dalam bidang perumahan dan permukiman. Salah satu prinsip yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah prinsip partisipatif (Yulianti, 2012).

Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya disebut PNPM MP berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (*channelling program*)untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutanya pada tahap akhir dari transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalammengembangkan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Program PNPM Mandiri perkotaan dianggap untuk menjadikan masyarakat yang mandiri melalui penyertaan masyarakat di dalamnya dan mengatasi kemiskinan di perkotaan, keterlibatan masyarakat dapat dilihat dengan cara yang berbeda-beda dalam

program ini. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai sebuah lembaga kepemimpinan kolektif dan berperan sebagai representasi warga dengan proses pemilihan langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencaloan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. Kekuasaan atau kewenangannya dan legitimasinya BKM bersumber dari masyarakat setempat. BKM selaku penggerak program PNPM Mandiri perkotaan, sangat penting kedudukannya sebagai ujung tombak terlaksananya program PNPM Mandiri perkotaan dan juga sebagai wadah perjuangan kaum miskin kota dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kaum miskin kota tersebut BKM sifatnya sukarela, setiap kelurahan memiliki BKM sebagai representasi kelurahan mewakili warga di lingkup kelurahan tersebut agar kebutuhan kelurahan yang terwakilkan dapat diaspirasiakan kepada pemerintah daerah dan pemerintah terwakilkan itu dapat menikmati pembangunan yang dibutuhkan.

Dalam program PNPM Mandiri perkotaan terdapat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), KSM sebagai kelompok pemanfaat BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Sesuai dengan nama programnya, inti dari semua kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun kemandiriandi tingkat masyarakat. Untuk itulah, para relawan yangberasal dari unsur masyarakat di masing-masing kelurahandikoordinir, dilatih, dan diarahkan untuk mandiri dalam suatuwadah bernama Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM.Bermula dari BKM itulah, masyarakat dibangkitkan semangatdan kepeduliannya untuk ikut serta mencari solusi terbaikdalam menanggulangi kemiskinan. Kegiatan penanggulangankemiskinan dalam PNPM Mandiri Perkotaan difokuskan padatridaya atau 3 pemberdayaan yakni: pemberdayaan infrastruktur,pemberdayaan sosial, serta pemberdayaan ekonomi.Saat ini, lokasi dampingan PNPM Mandiri

Perkotaan tersebardi 33 provinsi, 267 kabupaten/kota, dan 10.948 kelurahan diseluruh Indonesia. Jumlah BKM yang sudah dibentuk samadengan jumlah kelurahan yang menjadi lokasi dampingan.Masing-masing BKM selanjutnya membentuk 3 unit pengelolayang terdiri dari:

- Unit Pengelola Keuangan (UPK)

- Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

- Unit Pengelola Sosial

KSM juga sebagai implementor dari perencanaan yang akan dilaksanakan. Jika BLM bentuk partisipasinya melalui partisipasi pikiran dan partisipasi ketrampilan, partisipatif aktif dalam PNPM Mandiri perkotaan.Peran serta masyarakat bervariasi dalam bentuk, tingkat intentitas, cakupan dan frekuensinya.BKM dan KSM memiliki peran yang penting masing-masing, keduanya saling membutuhkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara bersama-sama.BKM membutuhkan KSM sebagai badan yang menampung kemudian menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

PNPM Mandiri perkotaan setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada BKM terbaik, BKM terbaik nantinya akan menerima serapan bantuan dari pemerintah daerah sebagai *reward* atas kinerja BKM terbaik. Pemberian penghargaan ini juga untuk memotivasi BKM-BKM untuk meningkatkan kinerjanya. Pemilihan BKM terbaik dinilai dengan indikator sebagai berikut: (1) Keaktifan BKM, (2) BKM mempunyai sekretariat, (3) BKM telah melaksanakan pemilu sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, (4) BKM telah melaksanakan audit, (5) BKM berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, (6) pertemuan dengan pemerintah kelurahan, (7) pengelolaan PPM

(Penanganan Pengaduan Masyarakat), (8) Media warga/bulletin, (9) Keaktifan unit-unit pengelola, (10) Kinerja sekretariat, (11) Jadwal buka sekretariat, (12) Kelengkapan administrasi sekretariat, (13) BKM telah melaksanakan tujuan partisipatif, (14) BKM telah melaksanakan RWT (Rembug Warga Tahunan), (15) Swadaya Masyarakat, (16) Partisipasi Masyarakat, (17) BKM telah melaksanakan *channeling*, dan (18) Peta tematik (Septiany, 2012).

Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih sering dipandang sebagai domain urusan pemerintah saja. Uniknya, perspektif tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, namun juga datang dari kalangan aparat pemerintahan sendiri. Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat selama ini dalam upaya penanggulangan angka kemiskinan masih kecil.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula 100 – angka kemiskinan.Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantulsebanyak 126.98 jiwa dan terbanyak sebesar 12.454 jiwa yang terdapat di Kecamatan Kasihan dan terendah sebesar 4.109 jiwa yang terdapat di Kecamatan Srandakan, sedangkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, tertinggi terdapat di Kecamatan Dlingo yaitu sebesar 19,47% jika dibandingkan dengan jumlah pendudukdan persentase penduduk miskin terendah adalah di Kecamatan Bantul sebesar 9,85%. Hal ini karena Kecamatan Bantul merupakan ibukota dari Kabupaten Bantul dan perekonomiannya lebih maju sehingga masyarakat lebih sejahtera dibandingkan kecamatan lain. Untuk tingkat kabupaten persentase penduduk miskin sebesar 14,27%, sehingga ada 7

kecamatan yang mempunyai persentase lebih tinggi dari tingkat Kabupaten. Data secara lengkap seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah KK Gakin	Presentase	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
1	Kretek	9.659	1.542	15,96	29.212	4.267	14,61
2	Sanden	9.150	1.322	13,15	30.972	4.262	13,76
3	Srandakan	9.150	1.267	3,85	30.009	4.109	13,69
4	Pandak	15.621	2.641	16,91	50.386	8.302	16,48
5	Bambangliporu	12.381	1.604	12,96	39.537	4.967	12,55
6	Pundong	10.367	1.968	18,98	34.079	5.880	17,25
7	Imogiri	20.571	3.278	15,94	67.624	9.815	14,51
8	Dlingo	12.062	2.405	19,94	37.296	7.260	19,47
9	Jetis	17.552	3.100	17,66	56.042	8.735	15,59
10	Bantul	17.958	2.010	11,19	56.912	5.604	9,85
11	Panjangan	9.741	1.528	15,69	32.322	4.526	14,00
12	Sedayu	16.152	2.497	15,46	50.917	9.583	18,82
13	Kasihan	30.403	3.777	12,42	98.365	12.454	12,66
14	Sewon	26.375	3.744	14,20	88.983	11.937	13,41
15	Piyungan	14.521	2.248	15,48	46.948	6.455	13,75
16	Pleret	12.993	1.837	14,14	41.986	6.658	15,86
17	Banguntapan	28.003	3.783	13,51	98.021	12.166	12,41
Jumlah		**273.563**	**40.551**	**14,82**	**889.647**	**126.98**	**14,27**

Sumber : Database Profil Kabupaten Bantul Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa jumlah KK Kecamatan Banguntapan sebanyak 28.003 KK dengan jumlah KK Gakin sebesar 3.783 (13,51%). Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Banguntapan sebanyak 98.021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 12.166 (12,41%).

Dilihat dari data monografi Kelurahan Banguntapan pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk sebanyak 43.323 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 9.280 (KK), yang terdiri dari laki-laki 21.745 jiwa dan perempuan 21. 578 jiwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanapelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Banguntapan?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian adalah:

Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan.

D. Manfaat

Mengacu pada tujuan penelitian, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

   Dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan refrensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik.

DAFTAR PUSTAKA

Gustina, Indah. 2008. *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Di Kecamatan Medan Maimun*

Hatta, Zakia. R. 2011. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dilakukan Di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY*

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Sarasehan Dpd Golkar Tk.I JawaTimur Surabaya, 14 Maret 1997.*

Mardikanto, Totok. Dk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung :Alfabeta

Mohtar, Mas'oed. 1994. *Analisis kemiskinan struktural masyarakat*

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nasution, Nugroho. 2003. *Analisis Metodologi Penelitian*. Bandung: Alpha Beta

Namangjabar, John, A. 2010. *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat.*

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 2014. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2014*

Putra, Andika. 2009. *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)*

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

Rustiadi, E. 2009. *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Obor Indonesia

Septiany, Irma. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Dengan Penggunaan Model Clear Dikelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.*

Soemardjan, Selo. 1980. *Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.

Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung :Alfabeta

Sudirman, 2011. *Partisipasi masyarakat dalam implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri*

Takumansang, S. M. dkk.2013. *Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Teling Kecamatan Wenang*.

Tontowi, Ahmad. 2010. *Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*

Utomo, Dedy. Dkk. 2013. *Laksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*

Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok.*

Peraturan Perundang-Undangan

UU RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Perpres RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat